

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi rencana Strategis tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan Strategis dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja kegiatan tersebut merupakan suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategik yang diarahkan. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat merupakan dokumen perencanaan untuk Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada RPJMD dan Renstra BPKAD Tahun 2017-2019. Program dan kegiatan dimaksud tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan kegiatan atau program karena adanya perubahan kebijakan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dimana BPKAD merupakan gabungan dari Bidang Pengelolaan Keuangan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Sesuai Perbup Nomor 82 Tahun 2016 Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lombok Barat. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Maka dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang inventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan dan penghapusan, serta evaluasi dan pelaporan aset;
- d. pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahantara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
  15. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142)
21. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat khususnya pada Tahun 2017.

Sedangkan tujuannya adalah agar dapat disinkronkan dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat.

### 1.4 Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika pembahasan.

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPd, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

**BAB IV : PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (TAHUN 2016)

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat diajukan untuk mengidentifikasi sejauhmana hasil yang dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat terbentuk pada Tahun 2016 gabungan dari Bidang Pengelolaan Keuangan dan Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, sehingga evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi atas program dan kegiatan yang ada pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Adapun telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya sebagai berikut :

#### 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Melalui program pelayanan administrasi perkantoran dengan 12 kegiatan yang dianggarkan dianggarkan sebesar Rp. 707.935.300,00 dengan realisasi Rp. 623.234.067,00 atau 88,04% dan prosentase fisiknya 94,87%. rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KEU. (%)	FISIK (%)
1.	Penyediaan Jasa surat Menyurat	6.752.800,00	6.752.800,00	100,00	100,00
2.	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.850.000,00	11.580.118,00	77,98	88,99

3.	Penyediaan jasa pem. dan perijinan kend. dinas / ops.	49.800.000,00	39.186.349,00	78,69	89,34
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.593.000,00	76.373.000,00	92,47	96,23
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang Kebun dll	65.400.000,00	65.400.000,00	100,00	100,00
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	51.000.000,00	50.824.000,00	99,65	99,83
7.	Penyediaan alat tulis kantor	32.307.500,00	32.305.800,00	99,99	100,00
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	100,00
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang - Undangan	23.102.000,00	11.487.000,00	49,72	74,86
10.	Penyediaan makanan dan minuman	56.775.000,00	56.737.500,00	99,93	99,97
11.	Rapat - rapat koord. dan konsultasi ke dalam/ luar daerah	288.730.000,00	236.762.500,00	82,00	91,00
12.	Akuisi Pengarsipan	22.125.000,00	21.325.000,00	96,38	98,19

## 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Melalui program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran yang dialokasikan untuk 3 (tiga) kegiatan sebesar Rp. 753.191.000,00 dengan realisasinya anggaran sebesar Rp. 711.233.834,00 atau 94,43% dan realisasi fisiknya 96,04%. Target dan realisasinya seperti tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KEU. (%)	FISIK (%)
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	563.808.000,00	539.911.435,00	95,76	97,88
2.	Pengadaan Mebeulair	126.800.000,00	115.290.000,00	90,92	95,46
3.	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	62.583.000,00	56.032.399,00	89,53	94,77

## 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan dari program ini sebanyak 6 (enam) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.481.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.100.062.000,00 atau 81,70% dan realisasi fisiknya sebesar 90,99%. Target dan realisasi dari masing-masing kegiatan ini seperti tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	26.106.000,00	25.206.000,00	96,55	98,28
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	10.764.000,00	8.893.000,00	82,62	91,31
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan	22.649.000,00	3.383.000,00	14,94	57,47
4.	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	30.068.000,00	30.068.000,00	100,00	100,00
5.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	16.928.000,00	16.598.000,00	98,05	99,03
6.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	15.966.000,00	15.914.000,00	99,67	99,84

**4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kegiatan dari program ini sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.073.417,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.657.309.000,00 atau 61,24% dan realisasi fisiknya sebesar 81,37%. Target dan realisasi dari masing-masing kegiatan ini seperti tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1.	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	213.930.000,00	134.507.000,00	62,87	81,44
2.	Revaluasi/ Appraisal Aset/ Barang Daerah	475.517.000,00	215.878.000,00	45,40	72,70
3.	Optimalisasi Pengelolaan Asset Daerah	383.970.000,00	306.924.000,00	79,93	89,97

**5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Milik Daerah**

Kegiatan dari program ini sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.095.295.322,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.198.707.326,00 atau 44,73% dan realisasi fisiknya sebesar 79,33%. Target dan realisasi dari masing-masing kegiatan ini seperti tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1.	Penyertifikatan Tanah dan Pembuatan Pelang Nama Hak Atas Tanah Milik Daerah	237.500.000,00	181.653.240,00	76,49	88,24
2.	Pengadaan Tanah Pemda	15.754.644.372,00	6.960.016.236,00	44,18	72,09
3.	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	103.150.950,00	57.037.850,00	55,30	77,65

**6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan**

Kegiatan dari program ini sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.611.688.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.584.966.350,00 atau 51,14% dan realisasi fisiknya sebesar 75,57%. Target dan realisasi dari masing-masing kegiatan ini seperti tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1.	Fasilitasi Penyelesaian Konfliik-konflik Pertanahan	33.075.500,00	26.595.500,00	90,20	80,41
2.	Inventarisasi Tanah Milik Daerah	578.612.700,00	558.370.850,00	98,25	96,50

### 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Kegiatan dari program ini sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.095.295.322,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.198.707.326,00 atau 44,73% dan realisasi fisiknya sebesar 79,33%. Target dan realisasi dari masing-masing kegiatan ini seperti tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1.	Penyusunan Data Base Asset Daerah	307.695.800,00	157.356.600,00	51,14	75,57

### 2.2 Analisis Kinerja BPKAD

Beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman menilai kinerja pelayanan diantaranya :

- 1) Keterbukaan. Berkenaan dengan keterbukaan prosedur pelayanan, keterbukaan persyaratan pelayanan, dan keterbukaan biaya pelayanan;
- 2) Kemudahan. Berkenaan dengan kemudahan alur pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan dan kemudahan mengakses tempat pelayanan;
- 3) Kepastian. Berkenaan dengan kepastian biaya pelayanan, kepastian waktu pelayanan, ketepatan waktu penyelesaian sesuai standar dan kepastian (kejelasan) satuan/petugas yang memberikan pelayanan;
- 4) Keadilan. Berkenaan dengan perlakuan yang sama ketika menerima pelayanan;
- 5) Profesionalisme Petugas Yaitu berkenaan dengan kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas serta kejujuran petugas (tidak pungli);
- 6) Sarana dan Fasilitas yaitu berkenaan dengan ketersediaan sarana dan fasilitas, kenyamanan yang dirasakan dan ketersediaan fasilitas penunjang;
- 7) Keamanan, yaitu berkenaan dengan keamanan lingkungan dan sarana serta perasaan aman dalam pelayanan;
- 8) Kompensasi, yaitu berkenaan dengan ketersediaan kompensasi dan kepuasan yang dirasakan;
- 9) Sistem Penanganan Keluhan, yaitu berkenaan dengan ketersediaan sistem penanganan keluhan dan kepuasan yang dirasakan.



Beberapa layanan yang ada pada fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dinilai berdasarkan indikator kinerja pelayanan sebagai berikut :

1) Layanan Penyediaan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Dari beberapa sisi seperti keterbukaan, kepastian, profesionalisme petugas sudah cukup baik mengingat prosedur yang sudah baku dan adanya pembagian tugas sesuai jumlah SKPD yang ada. Layanan ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan APBD. Penerbitan SPD dilakukan per triwulan pada setiap tanggal 25 sebelum bulan pertama dalam triwulan terkait.

2) Layanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Dari sisi keterbukaan, kemudahan, kepastian, keadilan dan profesionalisme petugas sudah cukup baik. Layanan ini bersifat intern pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Layanan ini didasarkan atas dokumen SPM yang masuk dari SKPD yang harus diregister terlebih dahulu. Dalam proses layanannya diusahakan untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas yang menangani verifikasi kelengkapan SPM dengan petugas dari SKPD yang mengantar SPM. Dari sisi waktu layanannya proses penerbitan SP2D selama ini sudah cukup baik bahkan dalam menghadapi akhir tahun selalu dikeluarkan pedoman dalam bentuk surat edaran.

3) Layanan evaluasi rancangan Perda dan Perbup/Perwali APBD.

Dengan adanya jadwal/tahapan baku dalam melakukan evaluasi APBD, maka dari sisi kepastian, keterbukaan dan keadilan sudah cukup baik. Waktu dan tahapan layanan ini sangat terikat dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang ada.

4) Layanan asistensi dan pembinaan penganggaran seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Layanan ini meliputi asistensi RKA-SKPD dan DPA-SKPD. Waktu layanan ini membutuhkan waktu yang cukup lama guna mendalami indikator kinerja dan anggaran belanja agar saling bersesuaian. Pembinaan ini dilaksanakan dalam bentuk Asistensi dan sosialisasi pedoman-pedoman penganggaran, dalam hal ini BPKAD bekerjasama dengan SKPD terkait yaitu Bappeda.

- 5) Layanan asistensi dan pembinaan bendahara SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Layanan ini didahului atas penetapan Bendahara SKPD dengan SK Bupati yang difasilitasi oleh BPKAD.

- 6) Layanan asistensi dan pembinaan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku entitas akuntansi.

Layanan ini bermanfaat guna mempertahankan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SKPD selaku entitas akuntansi memiliki peran yang sangat penting sehingga perlu pembinaan yang intensif terutama berkenaan dengan perubahan penyajian laporan keuangan ke yang berbasis akrual. Pembinaan ini dapat berbentuk workshop, rekonsiliasi maupun pemberian petunjuk/pedoman-pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.

- 7) Layanan pencairan hibah dan bansos kepada lembaga/masyarakat.

Layanan ini melibatkan SKPD teknis mengingat setelah penetapan Bupati atas daftar penerima hibah dan bansos, dilakukan sosialisasi dan sekaligus asistensi kepada setiap SKPD yang akan menerbitkan NPHD dan kelengkapan lainnya. Segala kelengkapan dipersiapkan oleh SKPD dan SPP serta SPM diterbitkan oleh BPKAD Kabupaten Lombok Barat. Ada pun terkait dengan masyarakat penerima, maka BPKAD akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran.

- 8) Layanan informasi keuangan bagi masyarakat/publik.

Berkenaan dengan layanan ini, BPKAD belum memberikan informasi keuangan bagi masyarakat/ publik untuk mengakses layanan tersebut. Namun untuk publikasi informasi, masyarakat dapat mengaksesnya melalui website PPID yang diadakan oleh Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik Kabupaten Lombok Barat sebagai leading sektornya.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi BPKAD**

Pengelolaan keuangan dan aset yang baik dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipastikan bisa terwujud. Tanpa pengelolaan keuangan dan aset yang baik, pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan penuh

ketidakpastian. Percepatan sulit dilakukan dan dampaknya kinerja pembangunan secara keseluruhan beresiko tidak sesuai harapan.

Untuk menuju pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik, isu-isu strategis perlu dipetakan dengan tepat sebagai berikut :

1. Institusi BPKAD memiliki sumberdaya aparatur yang masih terbatas;
2. BPKAD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) belum dapat menjalankan fungsinya dengan optimal karena belum didukung sarana dan prasarana yang memadai;
3. BPKAD sebagai pembantu pengelola BMD belum dapat memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
4. Pelaksanaan APBD pada beberapa SKPD belum optimal;
5. Kemampuan fiskal Kabupaten Lombok Barat relatif rendah;
6. Tindak lanjut atas Laporan hasil pemeriksaan yang belum tuntas.

### **BAB III**

## **TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

### **3.1 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat**

#### **1. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

**Visi** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah ***"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berkualitas Dan Akuntabel Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera Dan Bermartabat"***.

#### **2. Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Misi merupakan pernyataan umum yang merumuskan tujuan inti organisasi yang perlu ditindak lanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. untuk misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum..

### **3.2 Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan bpkad.**

#### **1. Tujuan**

Tujuan dibuat untuk mengembangkan misi yang telah disusun bersama dan setiap bagian kerja pada tingkat dibawah kepala badan minimal dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada salah satu tujuan yang tela dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut maka di susunlah tujuan sebagai berikut.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu: ***" Terwujudnya semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah dapat dikelola secara tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"***

Tujuan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat terdiri dari :

1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;
3. Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum.

## **2. Sasaran**

Untuk mencapai hasil secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam rumusan yang lebih spesifik dalam kurun waktu yang lebih singkat dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, maka sasaran-sasaran yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang pada pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **3. Strategi**

**Strategi** yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan komitmen karyawan yang tinggi, serta meminimalisir faktor kelemahan internal seperti beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang belum memadai dengan upaya mencari solusi terhadap ancaman seperti pengaruh globalisasi, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat.

Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu;

1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien;
2. Pengkajian rencana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran;

3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis Teknologi Informasi (IT);
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
6. Peningkatan profesionalisme aparatur.

#### 4. Kebijakan

**Kebijakan** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Kemitraan dengan pihak terkait dalam peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Penyediaan sarana prasarana sebagai penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai;
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.
5. Mengembangkan potensi Aparatur Sipil Negara sesuai bidang dan tanggungjawab serta penerapan reward dan punishment.

### 3.3 Program dan kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan diatas, maka program-program BPKAD Kabupaten Lombok Barat diwujudkan melalui 9 (sembilan) Program dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Program Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan jasa pem. dan perijinan kend. dinas / ops.
- 5) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 6) Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang Kebun dll
- 7) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 8) Penyediaan alat tulis kantor
- 9) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan
- 11) Penyediaan makanan dan minuman

- 12) Rapat - rapat koord. dan konsultasi ke dalam/ luar daerah
- 13) Akuisi Pengarsipan
- 14) Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos).

**2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur**

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan mebeulair
4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**

- 1) Sosialisasi ketentuan pengelolaan aset daerah.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**

- 1) sistem info. dan penerapan sistem info. Berbasis TI (SOP)

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 3) penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 4) Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
- 5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 6) Penyusunan laporan keuangan triwulan
- 7) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 8) Penyusunan Semester dan Prognosis Pemda
- 9) Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik

**6. Prog. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan**

- 1) Penyusunan data base aset daerah

**7. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

- 1) Penyertifikatan tanah dan pembuatan plank nama hak milik atas tanah
- 2) Pengadaan tanah pemda
- 3) Pemindahtanganan barang milik daerah

**8. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan**

- 1) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- 2) Inventarisasi tanah milik pemda

**9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- 1) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
- 2) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
- 3) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
- 4) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 5) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 6) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 7) Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
- 8) penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- 9) Peningkatan manajemen aset
- 10) Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah
- 11) Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD
- 12) Penunjang petugas pengelola keuangan DPPKD
- 13) Pemeriksaan dan penelitian fungsional laporan pertanggungjawaban
- 14) Pembinaan monitoring evaluasi SPJ SKPD
- 15) Penyusunan laporan harian dan bulanan
- 16) Penyusuna SP2D
- 17) Koordinasi TPTGR
- 18) Penyusunan SPD
- 19) Komputerisasi pengelolaan gaji Kabupaten Lombok Barat
- 20) Rekonsiliasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan
- 21) Penyusunan produk hukum bidang keuangan
- 22) Optimalisasi pengelolaan aset daerah
- 23) Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua



## BAB IV

### INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

#### 4.1 Capaian Indiator Kinerja Rencana Strategis BPKAD

Indikator kinerja, keluaran sasaran dan capaian renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 sesuai dengan Rencana Strategis (renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019 serta pertanggungjawaban terhadap Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya dijabarkan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA BIAYA			
				PAGU ANGGARAN RENSTRA 2017-2019	ANGGARAN TAHUN 2016	PAGU INDIKATIF 2017	(%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran			782.046.400,00		773.861.900,00	98,95
1		Penyediaan Jasa surat Menyurat	Pendistribusian surat menyurat	7.706.800,00		7.706.800,00	100,00
2		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan fasilitas telepon dan jaringan internet	47.460.000,00		47.460.000,00	100,00
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk percepatan kerja	24.920.000,00		24.920.000,00	100,00
4		Penyediaan jasa pem. dan perijinan kend. dinas / ops.	Tersedianya jasa service dan suku cadang kend. dinas	108.300.000,00		108.300.000,00	100,00
5		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran Jasa pengelolaan Administrasi Keuangan.	99.320.000,00		99.320.000,00	100,00
6		Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang Kebun dll	Tersedianya tenaga kebersihan kantor (cleaning service) dan pramu kantor.	65.400.000,00		83.400.000,00	127,52

7		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terseainya jasa perbaikan peralatan kantor	17.000.000,00		17.000.000,00	100,00
8		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	13.702.500,00		13.702.500,00	100,00
9		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor	8.900.000,00		8.900.000,00	100,00
10		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang - Undangan	Tersedianya Surat kabar, buku-buku tentang pengelolaan keuangan dan aset, berbagai macam peraturan perundang-undangan	9.390.000,00		9.390.000,00	100,00
11		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi tamu dan kegiatan	72.184.000,00		113.184.000,00	156,80
12		Rapat - rapat koord. dan konsultasi ke dalam/ luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.	166.079.500,00		98.895.000,00	59,55
13		Akuisi Pengarsipan	Tersedianya pengarsipan berkas kantor	12.448.600,00		12.448.600,00	100,00
14		Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos)	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan dana bansos	129.235.000,00		129.235.000,00	100,00
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>2.005.480.000,00</b>		<b>2.005.480.000,00</b>	<b>100,00</b>
1		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	1.755.325.000,00		1.755.325.000,00	100,00
2		Pengadaan peralatan gedung kantor	Bertambahnya peralatan gedung kantor	53.550.000,00		53.550.000,00	100,00
3		Pengadaan mebeulair	Bertambahnya mebeulair kantor	33.760.000,00		33.760.000,00	100,00
4		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor secara berkala	15.000.000,00		15.000.000,00	100,00

5		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tersedianya pelayanan BBM, Suku Cadang pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak , pembayaran perpanjangan STNK.	147.845.000,00		147.845.000,00	100,00
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>169.198.000,00</b>		<b>169.198.000,00</b>	<b>100,00</b>
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program/kegiatan BPKAD dan penyusunan LAKIP	9.125.000,00		9.125.000,00	100,00
2		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan setiap semesternya	10.995.000,00		10.995.000,00	100,00
3		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan tahunan SKPD	15.453.000,00		15.453.000,00	100,00
4		Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya dokumen KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	20.268.000,00		20.268.000,00	100,00
5		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD	15.043.000,00		15.043.000,00	100,00
6		Penyusunan laporan keuangan triwulan	Tersusunnya laporan triwulan kantor	27.893.000,00		27.893.000,00	100,00
7		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	15.048.000,00		15.048.000,00	100,00
8		Penyusunan Semester dan Prognosis Pemda	Tersusunnya laporan semester dan prognosis PEMDA	33.592.000,00		33.592.000,00	100,00
9		Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya data dan bahan laporan keterbukaan informasi publik	21.781.000,00		21.781.000,00	100,00

4	<b>Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
1		Sosialisasi ketentuan pengelolaan asset daerah	Tersedianya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah				
5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>						
1		sistem info. dan penerapan sistem info. Berbasis TI (SOP)	Tersedianya sistem informasi berbasis IT				
6	<b>Prog. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>			<b>114.184.649,00</b>		<b>114.184.649,00</b>	<b>100,00</b>
1		Penyusunan data base asset daerah	Tersusunnya database aset daerah dan BMD dalam bentuk database	114.184.649,00		114.184.649,00	100,00
7	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>			<b>83.297.557.829,10</b>		<b>44.732.409.800,00</b>	<b>53,70</b>
1		Penyertifikatan tanah dan pembuatan plank nama hak milik atas tanah	Bukti kepemilikan tanah milik Pemda Lobar	286.096.350,00		286.096.350,00	100,00
2		Pengadaan tanah pemda	Tersedianya pengadaan tanah Pemda	82.995.148.029,10		44.430.000.000,00	53,53
3		Pemindahtanganan barang milik daerah	Terlaksananya pengamanan dan pemeliharaan BMD, penyusunan daftar aset bermasalah/sengketa aset.	16.313.450,00		16.313.450,00	100,00
8	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>			<b>214.065.700,00</b>		<b>214.065.700,00</b>	<b>100,00</b>
1		Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penyelesaian sengketa tanah Pemda melalui jalur hukum dan musyawarah	151.520.500,00		151.520.500,00	100,00

2		Inventarisasi tanah milik pemda	Terinventarisirnya aset Pemda (tanah pemda)	62.545.200,00		62.545.200,00	100,00
9	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>5.470.264.400,00</b>		<b>5.409.289.400,00</b>	<b>98,89</b>
1		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Pembentukan TAPD, Pelaksanaan TAPD, penyusunan dan pembahasan RAPBD, penetapan APBD, penyusunan Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)	1.022.943.000,00		1.105.943.000,00	108,11
2		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Perda Penjabaran APBD.	144.604.000,00		136.424.000,00	94,34
3		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Penyusunan dan pembahasan RAPBD Perubahan, Penetapan APBD Perubahan dan penyusunan DPA Perubahan	578.641.000,00		493.691.000,00	85,32
4		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya rancangan KDH penjabaran perubahan APBD	134.284.000,00		130.584.000,00	97,24
5		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	240.646.500,00		233.946.500,00	97,22
6		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Perda KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	124.130.000,00		116.580.000,00	93,92
7		Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Tersedianya sistem informasi keuangan daerah	201.950.000,00		198.050.000,00	98,07
8		penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan daerah	32.400.000,00		32.400.000,00	100,00

Rencana Kerja BPKAD-2017

9		Peningkatan manajemen asset	Laporan BMD dan DKBMD/DKPBM D.	82.080.000,00		78.880.000,00	96,10
10		Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	Penilaian BMD	155.123.000,00		155.123.000,00	100,00
11		Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD	Penyusunan draft DPA dan DPPA SKPD	18.450.000,00		18.450.000,00	100,00
12		Penunjang petugas pengelola keuangan DPPKD	Tersedianya jasa petugas pengelola keuangan SKPD	1.036.416.000,00		1.036.416.000,00	100,00
13		Pemeriksaan dan penilitian fungsional laporan pertanggungjawaban	Tersedianya jasa penilitian fungsional laporan	131.280.000,00		130.350.000,00	99,29
14		Pembinaan monitoring evaluasi SPJ SKPD	Tersedianya Rekonsiliasi dan SPJ SKPD	149.634.000,00		142.634.000,00	95,32
15		Penyusunan laporan harian dan bulanan	Tersusunnya data dan bahan laporan harian dan bulanan SKPD	25.324.500,00		25.324.500,00	100,00
16		Penyusuna SP2D	Tersedianya jasa penyusunan SP2D	252.800.000,00		245.595.000,00	97,15
17		Koordinasi TPTGR	Terselenggaranya koordinasi TPTGR oleh majelis dengan optimal	291.599.900,00		289.799.900,00	99,38
18		Penyusunan SPD	Tersusunnya SPD SKPD sesuai dengan kebutuhan pendanaan	34.635.000,00		34.635.000,00	100,00
19		Komputerisasi pengelolaan gaji Kabupaten Lombok Barat	Terkelolanya Gaji Aparatur Sipil Negara se kab. Lobar	276.040.000,00		267.180.000,00	96,79
20		Rekonsiliasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan	Terlaksananya rekon dan asistensi kedua	35.903.500,00		35.903.500,00	100,00
21		Penyusunan produk hukum bidang keuangan	Tersusunnya produk Hukum Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	14.679.500,00		14.679.500,00	100,00
22		Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Penetapan penggunaan BMD, kerjasama pemanfaatan, penagihan dan pemungutan hasil kerjasama pemanfaatan BMD	384.095.000,00		384.095.000,00	100,00

23	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	Terlaksananya pelatihan kebijakan akuntansi berbasis akrual	102.605.500,00		102.605.500,00	100,00
----	---	---	----------------	--	----------------	--------

#### 4.2 Pagu indikatif dan perkiraan maju tahun 2018

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 yang juga diharapkan dapat berlanjut pada tahun 2018, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merencanakan pagu dana indikatif kegiatan yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan total anggaran yang direncanakan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 14.675.465.999,64 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan enam puluh empat sen).

Dana tersebut diperuntukkan bagi pencapaian program dan kegiatan rutin dan kegiatan baru yang belum pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sehingga memberikan penambahan nuansa wawasan baru serta upaya bagi pencapaian Visi, Misi dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, dengan implementasi yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2017 yang mencakup 59 kegiatan dalam 9 program strategis.

Lebih lanjut mengenai gambaran keperluan pagu indikatif, sumber pendanaan pada Renja 2017 dan perkiraan target menuju tahun 2018 dapat dilihat pada tabel Rencana Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 terlampir.

#### 4.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Bdan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 seperti pada tabel dibawah ini :

PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017		SUMBER DANA
		JENIS	NILAI (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		782.046.400,00	APBD
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	BL	7.706.800,00	APBD
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BL	47.460.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BL	24.920.000,00	APBD
	Penyediaan jasa pem. dan perijinan kend. dinas / ops.	BL	108.300.000,00	APBD

	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BL	99.320.000,00	APBD
	Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang Kebun dll	BL	65.400.000,00	APBD
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BL	17.000.000,00	APBD
	Penyediaan alat tulis kantor	BL	13.702.500,00	APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BL	8.900.000,00	APBD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang - Undangan	BL	9.390.000,00	APBD
	Penyediaan makanan dan minuman	BL	72.184.000,00	APBD
	Rapat - rapat koord. dan konsultasi ke dalam/ luar daerah	BL	166.079.500,00	APBD
	Akuisi Pengarsipan	BL	12.448.600,00	APBD
	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos)	BL	129.235.000,00	APBD
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	BL	<b>2.005.480.000,00</b>	APBD
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	BL	1.755.325.000,00	APBD
	Pengadaan peralatan gedung kantor	BL	53.550.000,00	APBD
	Pengadaan mebeulair	BL	33.760.000,00	APBD
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	BL	15.000.000,00	APBD
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	BL	147.845.000,00	APBD
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	BL	<b>169.198.000,00</b>	APBD
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BL	9.125.000,00	APBD
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	BL	10.995.000,00	APBD
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	BL	0,00	APBD
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BL	15.453.000,00	APBD
	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD	BL	0,00	APBD



	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	BL	20.268.000,00	APBD
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	BL	15.043.000,00	APBD
	Penyusunan laporan keuangan triwulan Pemda	BL	27.893.000,00	APBD
	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan SKPD	BL	0,00	APBD
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	BL	15.048.000,00	APBD
	Penyusunan Semester dan Prognosis Pemda	BL	33.592.000,00	APBD
	Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik	BL	21.781.000,00	APBD
<b>4</b>	<b>Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	BL	0	APBD
	Sosialisasi ketentuan pengelolaan asset daerah	BL	0	APBD
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	BL	0	APBD
	sistem info. dan penerapan sistem info. Berbasis TI (SOP)	BL	0	APBD
<b>6</b>	<b>Prog. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>	BL	114.184.649,00	APBD
	Penyusunan data base asset daerah	BL	114.184.649,00	APBD
<b>7</b>	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	BL	<b>83.297.557.829,10</b>	APBD
	Penyertifikatan tanah dan pembuatan plank nama hak milik atas tanah	BL	286.096.350,00	APBD
	Pengadaan tanah pemda	BL	82.995.148.029,10	APBD
	Pemindahtanganan barang milik daerah	BL	16.313.450,00	APBD
<b>8</b>	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	BL	<b>214.065.700,00</b>	APBD
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	BL	151.520.500,00	APBD

	Inventarisasi tanah milik pemda	BL	62.545.200,00	APBD
--	---------------------------------	----	---------------	------

9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BL	5.470.264.400,00	APBD
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BL	1.022.943.000,00	APBD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	BL	144.604.000,00	APBD
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	BL	578.641.000,00	APBD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BL	134.284.000,00	APBD
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BL	240.646.500,00	APBD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BL	124.130.000,00	APBD
	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	BL	201.950.000,00	APBD
	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	BL	32.400.000,00	APBD
	Peningkatan manajemen asset	BL	82.080.000,00	APBD
	Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	BL	155.123.000,00	APBD
	Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD	BL	18.450.000,00	APBD
	Penunjang petugas pengelola keuangan DPPKD	BL	1.036.416.000,00	APBD
	Pemeriksaan dan penilitian fungsional laporan pertanggungjawaban	BL	131.280.000,00	APBD
	Pembinaan monitoring evaluasi SPJ SKPD	BL	149.634.000,00	APBD
	Penyusunan laporan harian dan bulanan	BL	25.324.500,00	APBD
	Penyusuna SP2D	BL	252.800.000,00	APBD
	Koordinasi TPTGR	BL	291.599.900,00	APBD
	Penyusunan SPD	BL	34.635.000,00	APBD
	Komputerisasi pengelolaan gaji Kabupaten Lombok Barat	BL	276.040.000,00	APBD
	Rekonsiliasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan	BL	35.903.500,00	APBD
	Penyusunan produk hukum bidang keuangan	BL	14.679.500,00	APBD

	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	BL	384.095.000,00	APBD
	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	BL	102.605.500,00	APBD
			<b>92.067.796.978,10</b>	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat beserta komponen pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja, hendaknya dapat dilaksanakan secara arif untuk diselesaikan dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 ini kami sampaikan, dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat beserta komponen pendukung yang terintegrasi didalamnya.

semoga Program dan kegiatan beserta target pencapaiannya pada tahun 2017 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Gerung, 16 Januari 2017

KEPALA BPKAD  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

**H. JOKO WIRATNO, SE., MM.**  
NIP. 19581210 198503 1 014

## Lampiran 1. Rencana Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2017-2019

No	Program	Kegiatan	Rencana Biaya		
			Tahun I (2017)	Tahun II (2018)	Tahun III (2019)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		782.046.400,00	977.558.000,00	1.020.017.812,50
		Penyediaan Jasa surat Menyurat	7.706.800,00	9.633.500,00	12.041.875,00
		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.460.000,00	59.325.000,00	74.156.250,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.920.000,00	31.150.000,00	38.937.500,00
		Penyediaan jasa pem. dan perijinan kend. dinas / ops.	108.300.000,00	135.375.000,00	169.218.750,00
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	99.320.000,00	124.150.000,00	155.187.500,00
		Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang Kebun dll	65.400.000,00	81.750.000,00	102.187.500,00
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.000.000,00	21.250.000,00	26.562.500,00
		Penyediaan alat tulis kantor	13.702.500,00	17.128.125,00	21.410.156,25
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.900.000,00	11.125.000,00	13.906.250,00
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang - Undangan	9.390.000,00	11.737.500,00	14.671.875,00
		Penyediaan makanan dan minuman	72.184.000,00	90.230.000,00	112.787.500,00
		Rapat - rapat koord. dan konsultasi ke dalam/ luar daerah	166.079.500,00	207.599.375,00	259.499.218,75
		Akuisi Pengarsipan	12.448.600,00	15.560.750,00	19.450.937,50
		Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos)	129.235.000,00	161.543.750,00	201.929.687,50

<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.005.480.000,00</b>	<b>2.506.850.000,00</b>	<b>3.133.562.500,00</b>
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.755.325.000,00	2.194.156.250,00	2.742.695.312,50
	Pengadaan peralatan gedung kantor	53.550.000,00	66.937.500,00	83.671.875,00
	Pengadaan mebeulair	33.760.000,00	42.200.000,00	52.750.000,00
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	147.845.000,00	184.806.250,00	231.007.812,50
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>184.198.000,00</b>	<b>245.872.500,00</b>	<b>307.340.625,00</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.125.000,00	11.406.250,00	14.257.812,50
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	10.995.000,00	13.743.750,00	17.179.687,50
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	15.625.000,00	19.531.250,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.453.000,00	19.316.250,00	24.145.312,50
	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	20.268.000,00	25.335.000,00	31.668.750,00
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	15.043.000,00	18.803.750,00	23.504.687,50
	Penyusunan laporan keuangan triwulan Pemda	27.893.000,00	34.866.250,00	43.582.812,50
	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan SKPD	0,00	-	-
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	15.048.000,00	18.810.000,00	23.512.500,00
	Penyusunan Semester dan Prognosis Pemda	33.592.000,00	41.990.000,00	52.487.500,00
	Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik	21.781.000,00	27.226.250,00	34.032.812,50
<b>IV.</b>	<b>Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>61.608.000,00</b>	<b>77.010.000,00</b>
	Sosialisasi ketentuan pengelolaan asset daerah	-	61.608.000,00	77.010.000,00
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	<b>-</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>126.250.000,00</b>
	sistem info. dan penerapan sistem info. Berbasis TI (SOP)	-	101.000.000,00	126.250.000,00

<b>VI.</b>	<b>Prog. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>	<b>114.184.649,00</b>	<b>142.730.811,25</b>	<b>178.413.514,06</b>
	Penyusunan data base asset daerah	114.184.649,00	142.730.811,25	178.413.514,06
<b>VII.</b>	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>83.297.557.829,10</b>	<b>4.580.112.250,00</b>	<b>5.725.140.312,50</b>
	Penyertifikatan tanah dan pembuatan plank nama hak milik atas tanah	286.096.350,00	357.620.437,50	447.025.546,88
	Pengadaan tanah pemda	82.995.148.029,10	4.202.100.000,00	5.252.625.000,00
	Pemindahtanganan barang milik daerah	16.313.450,00	20.391.812,50	25.489.765,63
<b>VIII.</b>	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	<b>214.065.700,00</b>	<b>267.582.125,00</b>	<b>334.477.656,25</b>
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	151.520.500,00	189.400.625,00	236.750.781,25
	Inventarisasi tanah milik pemda	62.545.200,00	78.181.500,00	97.726.875,00
<b>IX.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>5.470.264.400,00</b>	<b>8.162.830.500,00</b>	<b>10.203.538.125,00</b>
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1.022.943.000,00	1.278.678.750,00	1.598.348.437,50
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	144.604.000,00	180.755.000,00	225.943.750,00
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	578.641.000,00	723.301.250,00	904.126.562,50
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	134.284.000,00	167.855.000,00	209.818.750,00
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	240.646.500,00	300.808.125,00	376.010.156,25
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	124.130.000,00	155.162.500,00	193.953.125,00
	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	201.950.000,00	252.437.500,00	315.546.875,00
	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	32.400.000,00	40.500.000,00	50.625.000,00
	Peningkatan manajemen asset	82.080.000,00	102.600.000,00	128.250.000,00
	Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	155.123.000,00	193.903.750,00	242.379.687,50
	Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD	18.450.000,00	23.062.500,00	28.828.125,00
	Penunjang petugas pengelola keuangan DPPKD	1.036.416.000,00	1.295.520.000,00	1.619.400.000,00
	Pemeriksaan dan penelitian fungsional laporan pertanggungjawaban	131.280.000,00	164.100.000,00	205.125.000,00



	Pembinaan monitoring evaluasi SPJ SKPD	149.634.000,00	187.042.500,00	233.803.125,00
	Penyusunan laporan harian dan bulanan	25.324.500,00	31.655.625,00	39.569.531,25
	Penyusuna SP2D	252.800.000,00	316.000.000,00	395.000.000,00
	Koordinasi TPTGR	291.599.900,00	364.499.875,00	455.624.843,75
	Penyusunan SPD	34.635.000,00	43.293.750,00	54.117.187,50
	Komputerisasi pengelolaan gaji Kabupaten Lombok Barat	276.040.000,00	345.050.000,00	431.312.500,00
	Rekonsiliasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan	35.903.500,00	44.879.375,00	56.099.218,75
	Penyusunan produk hukum bidang keuangan	14.679.500,00	18.349.375,00	22.936.718,75
	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	384.095.000,00	480.118.750,00	600.148.437,50
	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	102.605.500,00	128.256.875,00	160.321.093,75
	Pengamana dan Penertiban Aset	0,00	1.325.000.000,00	1.656.250.000,00

